

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN**

Dalam praktek penegakan hukum seringkali dijumpai kasus Penipuan yang dibungkus dengan hubungan kontraktual atau perjanjian. Implikasi dari kontrak atau perjanjian tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Akibat kerugian yang timbul itu, dalam pandangan dan penafsiran terhadap peristiwa tersebut telah terjadi perbedaan pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan "penipuan". Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan "wanprestasi". Pendapat pertama berdasarkan pada suatu alasan dan argumentasi bahwa upaya yang dilakukan adalah menuntut secara pidana. Sedangkan pendapat yang kedua upaya yang dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan perdata. Permasalahan diatas kian rumit ketika tidak ada kesepahaman diantara para aparatur penegak hukum dalam menentukan batasan yuridis antara Penipuan dan Wanprestasi.

Untuk melindungi kepentingan korban yang dirugikan dan berharap segera mendapatkan prestasi yang diinginkan serta adanya keadilan, kemudian ditempuh upaya-upaya hukum melalui proses pidana, dalam proses peradilan pidana terjadi permasalahan yang tidak memenuhi harapan yang diinginkan, hal ini dihadapkan pada hakim peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam amar putusan terkait kasus penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual, antara hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun hakim tingkat Mahkamah Agung RI, telah terjadi inkonsistensi dalam amar putusannya, satu pihak hakim menyatakan merupakan suatu delik penipuan, di lain pihak hakim menyatakan merupakan wanprestasi.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana karakteristik tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan di masa mendatang.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan, Kontraktual, Keadilan*

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF VICTIMS IN CRIMINAL ACTION OF FRAUD ARISING FROM CONTRACTUAL RELATIONSHIPS IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF JUSTICE**

In law enforcement practice, Fraud cases are often found wrapped in contractual relationship or agreement. The implication of the contract or agreement is that if one of the parties does not fulfill the agreed performance, it will cause loss to either party. As a result of the losses that arise, in the view and interpretation of the event there has been a difference of opinion, the first opinion states that the matter is "fraud". Meanwhile, the second opinion states that the problem is "default". The first opinion is based on a reason and arguments that the effort made is criminal prosecution. Meanwhile, the second opinion is an effort made by filing a civil lawsuit. The above problems are even more complicated when there is no understanding among law enforcement officials in determining the juridical boundaries between Fraud and Default.

In order to protect the interests of victims who have been harmed and hope to immediately get the desired achievements and the existence of justice, then legal efforts are taken through the criminal process, in the criminal justice process there are problems that do not meet the desired expectations, this is confronted by the first level judicial judge, level on appeal and level of cassation there are differences in interpretation and understanding in the verdict related to fraud cases arising from a contractual relationship, between the first level judge, the level of appeal and the judge at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, there has been an inconsistency in the verdict, one judge stated it was a fraud offense , on the other hand, the judge stated that he was in default.

This study discusses how the characteristics of fraud arising from contractual relationships, how the implementation of the law against fraud arising from contractual relationships and how the ideal legal protection arrangements for victims in the settlement of cases of criminal fraud arising from contractual relationships so that guarantee legal certainty and justice in the future.

*Keywords:* Legal Protection, Criminal Action, Fraud, Contractual, Justice